BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Informan

Identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data mengenai jenis kelamin, umur responden, tingkat pendidikan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini :

A. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas informan, Kepala Sekretariat KPU, Badan Pengawas Pemilu, Kasubag dan anggota Teknis dan Hupmas, Kasubag dan Anggota Umum, Keuangan dan Logistik, Bagian Program dan Data, Kasubag dan Anggota Bagian Hukum terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki – laki dan perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional informan yang bersangkutan dalam menanggapi hasil kerja Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin informan yang ada pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, bisa dilihat pada tabel V.1 berikut :

Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Informan Menurut Jenis Kelamin Pada Penelitian Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki – Laki	8	66,7%
2	Perempuan	4	33,3%
Jumlah		**12**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penulis, 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah informan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu jika dilihat dari jenis kelamin laki – laki adalah 8 orang dengan persentase 66,7%, dan untuk jenis kelamin perempuan adalah 4 orang atau sama dengan jumlah persentase 33,3%, dari keseluruhan responden yang diwawancara berjumlah 12 orang.

B. Umur Informan

Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seorang dalam rangka mengambil keputusan apa yang harus dan tidak dilakukan. Usia merupakan faktor yang sangat baik pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas – tugas yang diberikan, selain itu usia juga berpengaruh pada produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan dan lain – lain. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada tabel V.2 yaitu tabel yang berisikan distribusi jumlah informan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

Tabel V.2 : Jumlah Informan Menurut Umur Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	< 30	1	8,3%
2	30 – 40	8	66,7%
3	41 – 50	0	0
4	>50	3	25%
	Jumlah	12	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata – rata usia informan berkisar antara 30 sampai dengan 40 tahun, hal ini dilihat dari jumlah informan yang berumur 30 – 40 tahun berjumlah 8 orang dari 12 orang informan atau sebesar 66,7%. Sedangkan yang berumur 50 lebih berjumlah 3 orang atau sebesar 35% dan ASN yang berumur dibawah 30 tahun berjumlah 1 orang atau sebesar 8,3%.

C. Tingkat Pendidikan Responden

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan juga dapat baik terhadap kinerja, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang pegawai maka akan semakin tinggi pula kinerja yang dimilikinya. Seluruh pegawai yang bekerja memiliki tingkat pendidikan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan instansi.

Pendidikan merupakan suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola fikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola fikir serta tingkah laku setiap orang. Pendidikan tidak bisa didapat begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan – tahapan baik dari keluarga (non-formal), lingkungan (non-formal), maupun sekolah (formal).

Adapun tingkat pendidikan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.3 : Jumlah Informan Menurut Tingkat Pendidikan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	8,3 %
2	SLTP	-	0 %
3	SLTA	5	41,7 %
4	Strata 1	5	41,7 %
5	Strata 2	1	8,3 %
Jumlah		12	100 %

Sumber : Data olahan penulis 2017

Dari data diatas diketahui bahwa untuk identitas informan dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan, untuk dapat diketahui pendidikan SD adalah 1 orang dengan persentase 8,3%, untuk pendidikan SLTA adalah 5 orang dengan persentase 41,7%, sedangkan untuk pendidikan Strata 1 adalah 5 orang dengan persentase 41,7% dan pendidikan strata 2 adalah 1 orang dengan persentase 8,3%.

D. Pangkat Golongan Terakhir

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam susunan kepegawaian dan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Oleh karena itu setiap pegawai diangkat dengan pangkat tertentu. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap instansi tertentu. Kenaikan pangkat ini dimaksudkan agar pegawai tersebut mampu meningkatkan tingkat produktivitasnya, memiliki motivasi yang lebih untuk lebih melakukan hal – hal yang bersifat inovatif atau setidaknya tidak akan melanggar aturan yang ada di dalam instansi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jabatan adalah sekelompok posisi yang sama dalam suatu organisasi. Dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil Negara dalam kerangka suatu satuan organisasi.

Tabel V.4 : Golongan Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu

No	Golongan	Golongan Ruang					Jumlah	Persentase
		A	B	C	D	E		
1	I	-	1	-	-	-	1	8,3%
2	II	-	2	-	-	-	2	16,7%
3	III	1	2	3	3	-	8	66,7%
4	IV	1	-	-	-	-	1	8,3%
	Jumlah	2	5	1	3	0	12	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa golongan kerja yang tertinggi Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yaitu pada golongan IV yaitu sebanyak 1 orang dengan persentase 8,3 %, golongan III sebanyak 8 orang dengan persentase 66,7%, golongan II sebanyak 2 orang, dengan persentase 16,7% dan golongan I sebanyak 1 orang dengan persentase 8,3%.

5.2. Hasil Penelitian Tentang Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Kinerja aparatur sipil Negara pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi suatu organisasi karena dapat menilai sejauh mana kemampuan dan kualitas kinerja yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

Kinerja atau unjuk kerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh aparatur atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. Unjuk kerja aparatur merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuannya, sehingga berbagai kegiatan harus dilakukan organisasi untuk meningkatkannya. Salah satu diantaranya adalah melalui penilaian kinerja seseorang. Kemudian kinerja KPU merupakan gambaran mengenai sejauhmana keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU. Pengukuran kinerja KPU ini dapat dilakukan oleh KPU sendiri atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan pada ukuran kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau output yang diperoleh.

Komisi pemilihan umum merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya.

Secara eksistensi KPU merupakan lembaga yang bersifat tetap. Disebut demikian karena KPU bukanlah lembaga yang bersifat sementara (*ad hoc*) tetapi merupakan lembaga Negara yang bersifat tetap dan berkesinambungan. Konsekuensinya, KPU akan terus ada dan tidak akan berubah ataupun hilang selama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masih ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, hanya saja dilakukan perubahan pada ketua dan anggota KPU sesuai dengan masa aktif jabatannya yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, yakni lima tahun sekali dan setelah itu akan di adakan pergantian.

Karena posisinya yang begitu penting dalam pelaksanaan pemilu tidak heran KPU rawan sekali dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, KPU harus mandiri, independen, netral dari tekanan manapun. Hal tersebut untuk menjaga perjalanan demokrasi Indonesia dalam melahirkan penguasa yang akan mengurusi Negara ini lima tahun berikutnya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum, dibutuhkan kesiapan para personil penyelenggara pemilihan umum agar kegiatan tersebut dapat berjalaan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan serta mengedepankan pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dengan maksud tersebut, KPU melaksanakan pelatihan-pelatihan teknik menyangkut tata cara pemilihan calon legislatif termasuk tata cara pengisian formulir yang digunakan pada hari pemunggutan suara. Adapun pelatihan tersebut diselenggarakan dengan maksud agar setiap penyelenggara dapat memahami tata cara pemunggutan suara dan mampu melaksanakan kegiatan pemunggutan suara dan penghitungan suara di TPS pada setiap kegiatan berlangsung.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Umum tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman yang benar dikalangan masyarakat dan partai peserta pemilu tentang proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemilu.

Sosialisasi ini sekaligus menjadi langkah pencegahan untuk meminimalisir permasahan yang muncul, sehingga jangan sampai masyarakat, partai politik ataupun personil penyelenggara kurang memahami teknis pelaksanaan. Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi mulai dari tinggkat penyelenggara (KPU, PPK, PPS dan KPPS) sampai kepada seluruh masyarakat.

Penelitian ini membahas mengenai kinerja Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan Aparatur Sipil Negara di Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu dinilai memiliki sikap yang kurang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Kantor KPU Indragiri Hulu masih dinilai rendah serta Kurangnya komunikasi yang harmonis dengan sesama rekan kerja.

Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Mangkunegara (2000;67) mengatakan bahwa kinerja adalah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.

Adapun beberapa indikator yang perlu digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2010: 178-180), antara lain yaitu:

1. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output. Konsep produktifitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktifitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Sedangkan yang dimaksud produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional, adalah suatu sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini.

Salah satu bagian pengembangan kinerja suatu instansi, baik itu pemerintah maupun swasta menginginkan karyawannya memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, hal ini sangat diperlukan demi menunjang tercapainya tujuan suatu instansi. Upaya meningkatkan produktivitas kerja yang diberikan suatu anggota pemerintah maupun swasta kepada masyarakat atau kliennya harus pula dikaitkan dengan pengetahuan dan keterampilan para anggota tersebut. Artinya rendahnya produktivitas kerja dan mutu pelayanan yang diberikan seorang pegawai tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

semata-mata disebabkan oleh tindakan dan perilaku yang disfungsional akan tetapi sangat mungkin karena tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tidak sesuai dengan tugas yang dipegang olehnya.

Faktor pendukung produktivitas Kinerja ASN pada kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada indikator Produktifitas sebagian besar ASN pada Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu sudah mengetahui tugas dan fungsinya masing, dan sudah di dukung dengan sarana dan prasarana yang digunakan untuk penunjang kinerja. Sedangkan faktor penghambat pada indikator produktifitas adalah Jaringan internet yang digunakan kurang memadai, sehingga berdampak pada mengirim laporan e-monev yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Mengenai produktivitas kinerja Aparatur Sipil Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan observasi diketahui masih rendahnya tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas, seperti yang terjadi pada kegiatan memasukkan e-monev setiap bulan, namun pada bulan November dan Desember 2017 belum diinput sampai pada bulan april 2018. Kemudian pengisian laporan capaian output Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan PMK Nomor 249 Tahun 2011 dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017, seharusnya laporan tersebut dapat diselesaikan paling lambat sampai dengan tanggal 14 Februari 2018 namun laporan tersebut baru bisa di selesaikan pada bulan Mei 2018, hal ini mendapat teguran dari Kepala Sekretariat Jenderal KPU.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Produktivitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bagaimanakah produktivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan Aparatur Sipil Negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak Dedi Pedianto selaku Kasubag Teknis dan Hupmas pada tanggal 15 oktober 2018, yang menyatakan bahwa :

> *"Tentu kami mengetahui jam masuk dan pulang kantor. Masuk kantor jam 7.30 sudah berada di kantor jam 08.00 sudah melaksanakan apel. Jam 16.00 sudah pulang kantor. Menginput data kehadiran dengan melakukan finger print pada saat absen datang dan pulang. Adapun tugas bagian teknis dan hupmas adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu. Salah satunya mengadakan pertemuan teknis berupa sosialisasi, kampanye dll. Selama pemilu kurang lebih 8 bulan. Untuk penyelesaian penyusunan juknis Insyallah kami beruhasa tepat dengan waktu yang telah ditetapkan."*

Selanjutnya Bapak Dedi, selaku staf bagian teknis dan hupmas menyatakan :

> *"Saya mengetahui jam masuk dan pulang kantor, masuk kantor jam 08.00 pagi dan pulang jam 16.00 sore. Tugas dan fungsi bagian teknis adalah melakukan sosialisasi pemilu kepada peserta pemilu dan masyarakat dan juga melakukan kampanye. Semua tugas yang kami lakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU RI."*

Hasil tanggapan Ibu Nurhasyidah selaku Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik menyatakan bahwa :

> *"Saya mengetahui jam masuk dan pulang kantor senin sampai kamis masuk jam 08.00 pulang jam 16.00 sore. Waktu yang digunakan untuk menyusun perencanaan keuangan biasanya sekitar 2 minggu, perencanaan sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Laporan keuangan kami kirim sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan contohnya laporan SAI dan laporan*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pertanggung jawaban keuangan setiap bulannya. SAI dan rekonsilisasi setiap bulan juga, laporan pengelolaan asset dan SIMAK setiap 6 bulan, laporan kepegawaian setiap sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan laporan penyelenggara pemilu selalu di up todate setiap bulannya. Sampai saat ini belum pernah ada teguran tentang keterlambatan laporan – laporan tersebut".

Sedangkan menurut Yusti Eilendra selaku staf bagian umum, keuangan dan logistic menyatakan bahwa :

"Jam masuk dan pulang kantor adalah pukul 08.00 dan 16.00 sore. Setiap bulannya merekap SPIP dan melaporkan ke Provinsi, menerima surat masuk dan keluar.jika ada PAW melakukan pelantikan jika da. SPIP diinput setiap bulan. Waktu yang diperlukan 1 minggu. Yang diinput data dari kepegawaian, teknis dan keuangan. Sedangkan PAW tergantung jika ada yang mengundurkan diri atau tidak".

Selanjutnya menurut Renny Septiana yang juga selaku staf bagian umum, kuangan dan logistic menyatakan bahwa :

"Iya taulah, masuk jam 08.00 pagi pulang jam 16.00 soren untuk senin sampai kamis dan untuk jum'at dari jam 08.00 pagi sampai jam 16.30. Waktu yang diperlukan untuk menyusun bukti laporan keuangan setiap kali pengajuan SPJ harus sudah ada kalo SPJ belum ada tidak bisa mengambil uang di KPPN, sebelum tanggal 10, tapi kami berusaha tidak sampai tanggal 10 setiap bulannya sudah saya laporakn. Mengenai masalah saldo rekening Koran sudah saya laporan ke pada KPPN ke Provinsi gitu juga, cuma ada sesekali kendala mengirim laporan ke Provinsi. Karena operatornya ada yang merangkap kerjanya. Terjadi mengirim laporan ke KPPN ada sedikit terlambat itupun tidak setiap bulan cuma sesekali terlambatnya."

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemudian menurut Staf Bagian Program dan Data yaitu bapak Dedi Afda Putra yang menyatakan :

> *"Masuk pukul 07.30 pulang pukul 16.00, kemudian hari jum'at masuk pukul 07.30 pulang pukul 16.30 sore. Saya sebagai operator aplikasi data pemilih, adalah aplikasi sebagai pemukthairan pemilih pemilu maupun pilkada disini segala pebaikan dipalikasi mepallui daya pemilih melalui aplikasi data pemilih. Data awal diperoleh dari hasil DP4 (daftar penduduk, potensial, pemilih) disinkronisasi dengan daftar pemilih tetap terakhir disinkronisasi baru di tetapkan oleh KPU Provinsi dan Kota. Waktu yang diperlukan operator untuk pilkada butuh waktu 3 bulan. Pemilu sementara 3 bulan dan di tambah lagi 2 bulan. Sekarang sudah memasuki bulan ke 4. Kalau diaplikasi KPU sesuai tahapan Cuma penambahan sekarang adalah tahapan penyempurnaan."*

Sedangkan menurut Staf Bagian Program dan Data yaitu bapak Guswaldi menyatakan :

> *"Saya mengetahui jam masuk dan pulang kantor, masuk jam 08.00 dan pulang jam 16.00 sore. Tugas utama saya sebagai staf proda adalah mensikronisasikan DP4 dengan daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh KPU. Waktu yang diperlukan untuk mensinkronkan DP4 dengan daftar pemilih tetap adalah 5 bulan dilanjutkan dengan tahapan penyempurnaan. Kami berusaha menyelesaikan setiap tugas kepada kami sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan*".

Selanjutnya menurut Ibu Rini Ambarwati selaku Kasubag Hukum, menyatakan :

> *"Masuk jam 08,00 pulang jam 16.00 untuk jum'at pulang jam 16.30 WIB. Daftar kehadiran pakai system finger print untuk masuk dan pulang kantor. Hukum tugas utama yaitu memback up sebagian lain. Artinya ada masalah dan sengketa di bagian KPU kami menyusun jawaban dan peraturannya. Garis besarnya yaitu kami membuat aturan dan keputusan KPU Indragiri Hulu dan menyusun bahan - bahan sengketa hukum. Waktu yang diperlukan tergantung pada tahapannya. Seandainya ada gugatan waktu yang diperlukan antara 1 hari atau 2 hari biasanya diataur jadwalnya*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh Bawaslu dan KPU itu sendiri. Jika ada gugatan bawaslu kurang lebih 4 hari untuk jawaban jika ada gugatan di MK gugatan PHPU itu kami diberi waktu 2 hari sampai pada jawaban setelah menerima gugatan dari pemohon."

Bapak Romi Erdianto, selaku Staf bagian hukum, menyatakan :

"Iya, saya mengetahui jam masuk dan pulang kantor, masuk jam 08.00 dan pulang jam 16.00 sore, dengan menggunakan finger print sebagai absensi kehadiran. Tugas saya adalah membuat aturan dan keputusan – Keputusan KPU Indragiri Hulu dan menyusun bahan - bahan sengketa hukum. Waktu yang diperlukan tergantung pada tahapannya. Seandainya ada gugatan waktu yang diperlukan antara 1 hari atau 2 hari biasanya diataur jadwalnya oleh Bawaslu dan KPU itu sendiri."

Secara keseluruhan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sudah produktif dalam menjalankan tugas, hal ini dilihat dari hasil wawancara sebagian besar ASN sudah mengetahui jam masuk dan pulang kantor dan juga mengetahui secara pasti tugas dan fungsinya masing – masing. Pada umumnya ASN selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Namun dari hasil wawancara tersebut masih terdapat perbedaan antara jam masuk dan pulang kantor, sebagian ASN menyebutkan jam masuk kantor pukul 07.30 sementara ASN yang lain menyatakan masuk kantor pukul 08.00. berdasarkan peraturan KPU Kabupaten Indragiri Hulu jam masuk kantor adalah pukul 07.30 WIB. Oleh sebab itu masih dibutuhkan ketetapan yang pasti mengenai jam masuk dan pulang kantor sehingga kedisiplinan bisa di terapkan pada Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Selanjutnya mengenai tanggapan Bawaslu terhadap kinerja ASN Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Dedi Risanto selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2018 mengenai produktivitas kinerja ASN di KPU Kabupaten Indragiri Hulu, menyatakan :

> *"Sudah cukup baik, apa yang kami minta dapat tersedia dengan baik. Mengenai produktivitas kerja sangat baik. Kinerja asn menuruut saya sudah mengalami peningkatan misalnya semua laporan yang kami minta sudah selesai di kerjakan tepat waktu dengan baik."*

Selanjutnya bapak Mulianto, menyatakan :

> *"Dari pemantauan saya dan kinerja dan kerja sama yang dilakukan cukup memuaskan baik dari segi pelayanan maupun pemantapan. Produktifitas kita melihat KPU sangat produktif sekali dari agenda yang begitu padat sampai malam pun dikerjakan oleh ASN di KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Selama bermitra khusus dar tahun 2017 ada peningkatan kinerja. Di kpu sendiri tahapan begitu banyak ditambah dengan kinerja penunjang. Indikator yang digunakan adalah penyelesaian tahapan – tahapan pemilu dapat diselesaikan dengan baik dan penyelenggara pemilu sukses untuk Kabupaten Indragiri Hulu."*

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Khairudin pada tanggal 10 Oktober 2018 mengenai produktivitas dalam Kineja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan :

> *"Pada dasarnya kami mengetahui jam masuk dan pulang kantor, kita di kantor kita ini masuk jam 08.00 pulang jam 16.00, insyallah saya sebagai pimpinan sebelum jam 08.00 sudah datang di kantor. Dalam mengisi daftar kehadiran sudah sesuai karna itu sudah kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara untuk disiplin dalam menjalankan tugasnya. Dalam penyusunan program dan anggaran pemilu saya sebagai KPA itu akan menengok atau meninjau dan mngkoordinir tentang program – program dan anggaran pemilu bekerja sama dengan Kasubag program dan anggaran. Waktu yang diperlukan dalam menyusun program dan anggaran pemilu paling lama 2 minggu tapi insyallah sebelum dua minggu sudah selesai sesuai dengan surat perintah dari atasan. Waktu yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan dan kegiatan 1 tahun dimulai dari januari sampai pada desember tahun berjalan. Dalam menyusun laporan kegiatan insyallah sesuai dengan waktu yang ditentukan".*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa indikator produktivitas dalam Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, berada pada kategori Cukup Baik. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya masih adanya ASN yang tidak mengetahui pasti mengenai jam masuk dan pulang kantor, masih ada yang mengatakan jam masuk pukul 08.00 sedangkan jam masuk kantor sesuai dengan yang telah di tetapkan adalah pukul 07.30 WIB. Sehingga mengenai jam masuk dan pulang kantor masih perlu ditetapkan dan disosialisasikan kepada ASN agar dapat meningkatkan kedisiplinan ASN pada Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja birokrasi publik yang mudah dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat dapat menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kualitas Layanan Menurut Levine (dalam Nasucha, 2004:25), kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, yaitu masyarakat puas atau tidak puas. Kualitas layanan yang dimaksud disini adalah bagaimana KPU dalam memberikan pelayanan yang efesien dan tepat guna kepada masyarakat, kualitas pelayanan tersebut dapat berupa informasi yang diberikan, kepuasan sarana dan prasarana yang disediakan, keramahan dan kemampuan para pegawai dalam melayani masyarakat dan juga menerima keluhan dari masyarakat.

Faktor pendukung Kinerja ASN pada kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada indikator Kualitas Layanan, ASN sudah menyadari akan tugas ASN sebagai pemberi pelayanan, jadi ASN berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada peserta pemilu. Sedangkan faktor penghambat pada indikator kualitas layanan adalah harus memahami berbagai macam karakteristik penerima layanan dalam hal ini adalah peserta pemilu dan partai politik.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Kualitas Pelayanan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah Kualitas Layanan yang diberikan Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan Aparatur Sipil Negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak Dedi Pedianto selaku Kasubag Teknis dan Hupmas pada tanggal 15 Oktober 2018, yang menyatakan bahwa :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"*Kami sudah memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada peserta pemilu, kami berusaha memenuhi kebutuhan peserta pemilu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan*"

Selanjutnya Bapak Dedi, selaku staf bagian teknis dan hupmas menyatakan :

"Dalam memberikan pelayanan kami selalu berupaya memberikan pelayanan prima kepada peserta pemilu, selain melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya pemilu kami juga melakukan kampanye dan bimbingan teknis agar masyarakat mengenal dengan baik calon – calon yang akan di pilih pada pemilihan umum. Kami juga berusaha menerima masukan dan saran dari peserta pemilu demi perbaikan kinerja yang akan datang. Sampai saat ini baik peserta pemilu dan partai politik merasa puas dengan pelayanan di bidang teknis".

Hasil tanggapan Ibu Nurhasyidah selaku Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik menyatakan bahwa :

"Dalam penggunaan anggaran kami selalu terbuka melaui web dan SAPP Kabupaten Indragiri Hulu mengenai jumlah anggaran yang diterima dan anggaran yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum berkaitan dengan padatnya agenda dan kegiatan yang dilakukan".

Sedangkan menurut Yusti Eilendra selaku staf bagian umum, keuangan dan logistic menyatakan bahwa :

"Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada pimpinan, rekan kerja maupun masyarakat dalam hal ini peserta pemilu, pelayanan yang kami terima berupa surat masuk dan keluar dan pelaporan kepada atasa maupun KPPN. Dalam membuat laporan kami berusaha untuk melaporkan dalam bentuk SPJ sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan".

Selanjutnya menurut Renny Septiana yang juga selaku staf bagian umum, kuangan dan logistic menyatakan bahwa :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"Mengenai kualitas pelayanan kami sudah memberikan pelayanan yang baik seperti laporan – laporan yang dilaporkan kepada atasan yaitu LPJ Bendahara, sebelum tanggal 10 setiap bulannya harus sudah diantar rekening Koran, realisasi anggaran, buku kas umum, SIMAK, setiap bulan harus dilaporkan kepada atasan."

Kemudian menurut Staf Bagian Program dan Data yaitu bapak Dedi Afda Putra yang menyatakan :

"Saya sebagai operator aplikasi data pemilih, adalah aplikasi sebagai pemuktahiran pemilih pemilu maupun pilkada disini segala pebaikan dipalikasi mepallui daya pemilih melalui aplikasi data pemilih. Data awal diperoleh dari hasil DP4 (daftar penduduk, potensial, pemilih) disinkronisasi dengan daftar pemilih tetap terakhir disinkronisasi baru di tetapkan oleh KPU Provinsi dan Kota. Waktu yang diperlukan operator untuk pilkada butuh waktu 3 bulan. Sementara pemilu sementara 3 bulan dan di tambah lagi 2 bulan. Sekarang sudah memasuki bulan ke 4. Kalau diaplikasi KPU sesuai tahapan cuma penambahan sekarang adalah tahapan penyempurnaan."

Sedangkan menurut Staf Bagian Program dan Data yaitu bapak Guswaldi menyatakan :

"*Dalam memberikan pelayanan kami dari bagian program dan data berupaya untuk mengisi data pemilih sesuai dengan keinginan pemilih. Namun masih ada perbaikan data pemilih yang invalid yaitu data tidak sesuai dengan pemilih itu sendiri misalnya kesalahan nama, tanggal lahir dan sebagainya. Kami berupaya memperbaiki secepatnya.*".

Selanjutnya menurut Ibu Rini Ambarwati selaku Kasubag Hukum, menyatakan :

"Bentuk pelayanan yang kami berikan dari bidang hukum adalah Hukum itu memback up semua sub bagian. Yang paling banyak kami bekerja sama dengan teknis. Karena dibagian teknis banyak melibatkan aturan. Jadi kami harus sesuai dengan aturan PKPU mengawasi pekerjaan teknis tersebut. Pernah ada beberapa kali sengketa pada pemilu tahun 2014 itu kami sebgai pihak terkait karna pemilu tahun 2014 termohon itu KPU RI jadi kami

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kebetulan di Indragiri Hulu itu ada beberapa Kecamatan yang bermasalah tp tidak ada yang signifikan. Pemilu tahun 2019 kebetulan kami ada pengaduan PKPI salah satu dapilnya ditiadakan karena tidak memenuhi syarat di perwakilan perenpuannya. Sempat ada mediasi tapi tidak ada titik temu dan pada dasarnya semua gugatan dikabulkan oleh bawaslu."

Bapak Romi Erdianto, selaku Staf bagian hukum, menyatakan :

"Kami sudah berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik, karena bagian hukum yang memback up semua bagian yang memiliki permasalahan. Jadi kami harus menyiapkan aturan – aturan sesuai dengan Undang – Undang dan KPU RI"

Secara keseluruhan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sudah melaksanakan pelayanan dengan baik, hal ini dilihat dari hasil wawancara sebagian besar ASN yang mengetahui tugas dan fungsi nya masing – masing serta selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dengan banyak melakukan inovasi – inovasi pelayanan.

Selanjutnya mengenai tanggapan Bawaslu terhadap kinerja ASN Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Dedi Risanto selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2018 mengenai Kualitas Pelayanan ASN di KPU Kabupaten Indragiri Hulu, menyatakan :

"Sudah cukup baik, karna dalam memberikan pelayanan KPU Kabupaten Indragiri Hulu sudah berupaya menyiapkan dokumen – dokumen yang kami perlukan dalam mengawasi KPU Kabupaten Indragiri Hulu, apabila ada dokumen yang diperlukan sudah disiapkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu".

Selanjutnya bapak Mulianto, menyatakan :

"Selama bermitra khusus dar tahun 2017 ada peningkatan kinerja. Di kpu sendiri tahapan begitu banyak ditambah dengan kinerja penunjang. Indikator yang digunakan adalah penyelesaian tahapan – tahapan pemilu dapat diselesaikan dengan baik dan penyelenggara pemilu sukses untuk Kabupaten Indragiri Hulu. Pelayanan nya pun berkualitas hal ini dilihat dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

seluruh rangkaian tahapan dapat diselesaikan dengan baik. Disini kita lihat kenerja kpu sudah sangat maksimal. Dari segi partisipasi masyarakat masih kurang, sosilaisasi ke masyarakat mengenai hal pemilih yang harus di tingkat lagi."

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Khairudin pada tanggal 10 Oktober 2018 mengenai Kualitas Pelayanan dalam Kineja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan:

"Kita sudah pasti memberikan dukungan kepada pegawai KPU terhadap semua yang dilakukan sesuai dengan disiplin pada kantor KPU Indragiri Hulu. Untuk pelayanan di KPU kita membidangi penyelenggaraan tentang pemilihan Gubernur Riau dan Bupati pada tahun ini kita membidangi pemilihan DPR dan DPRD kita berusaha memberikan pelayanan prima kepada peserta pemilu. Dalam melakukan pelayanan kami mendapat masukan dari komisionil serta LO yang diutus oleh partai politik apabila terdapat masalah harus kita dudukkan bersama sebagai contoh pemasangan APK, APK itu kita minta dulu ke pihak pemerintah daerah, kemudian pihak pemerintah daerah menghubungi kembali ke kita untuk di tindak lanjuti. Saran dan masukan negative dari masyarakat tentang DCT dan DCS apabila masyarakat ada yang tidak sesuai kami beri waktu 2 minggu untuk melapor ke kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu".

Dari hasil tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sudah baik, hal ini dilihat dari tanggapan responden yang merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu dan juga terpenuhinya semua dokumen yang dibutuhkan oleh peserta pemilu.

3. Responsivitas.

Responsivitas yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat Responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena Responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsifitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Organisasi yang memiliki Responsifitas yang rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

Faktor pendukung Kinerja ASN pada kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada indikator Responsifitas adalah KPU Kabupaten Indragiri Hulu sudah mempunyai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang jelas dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Sedangkan faktor penghambat pada indikator Responsivitas suatu birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang rendah juga banyak disebabkan oleh belum adanya pengembangan komunikasi eksternal secara nyata oleh jajaran birokrasi pelayanan. Indikasi nyata dari belum dikembangkannya komunikasi eksternal secara efektif oleh birokrasi terlihat pada masih besarnya *gap* yang terjadi. *Gap* terjadi merupakan gambaran pelayanan yang memperlihatkan hahwa belum ditemukan kesamaan persepsi antara harapan masyarakat dan birokrat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Responsivitas yang diberikan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bagaimanakah bentuk Responsivitas yang diberikan Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan Aparatur Sipil Negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak Dedi Pedianto selaku Kasubag Teknis dan Hupmas pada tanggal 15 oktober 2018, yang menyatakan bahwa :

> "*Bentuk responsivitas yang kami lakukan yaitu dalam proses sosialisasi dan juga dalam melaksanakan bimbingan teknis. Dalam proses bimbingan teknis kami banyak menerima input dan aspirasi dari masyarakat*"

Selanjutnya Bapak Dedi, selaku staf bagian teknis dan hupmas menyatakan :

> *"Tentu, kami banyak menerima masukan dari masyarakat terkait dengan kinerja ASN pada KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada saat kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan pemilu".*

Hasil tanggapan Ibu Nurhasyidah selaku Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik menyatakan bahwa :

> *"Dalam menyusun perencanaan keuangan kami tidak melibatkan masyarakat, kami hanya melibatkan berapa jumlah Ad hoc yang ada di KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Sejauh ini tidak ada kendala dalam perencaan keuangan. Selama ini keuangan kita selain di kelola oleh pengelola keuangan setiap bulannya di reviwe oleh bagian keuangan dan umum dan logistic dalam rapat pleno."*

Sedangkan menurut Yusti Eilendra selaku staf bagian umum, keuangan dan logistic menyatakan bahwa :

> *"Kalau partisipasi dari masyarakat, saya rasa tidak ada berkaitan langsung dengan masyarakat. Kami bekerja sama dengan bagian program dan data dalam menyusun e-monev dan SPM keuangan".*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya menurut Renny Septiana yang juga selaku staf bagian umum, kuangan dan logistic menyatakan bahwa :

> *"Dalam menjalankan tugas menginput pelaporan kami selalu menginput aspirasi dari masyarakat dan selalu mengupayakan memenuhi kebutuhan peserta pemilu".*

Kemudian menurut Staf Bagian Program dan Data yaitu bapak Dedi Afda Putra yang menyatakan :

> *"Dalam menginput data pemilih kami berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini bertujuan agar masyarakat lebih bersemangat untuk memberikan hak suaranya demi kesuksesan pemilu"*

Sedangkan menurut Staf Bagian Program dan Data yaitu bapak Guswaldi menyatakan :

> "*Dalam memberikan pelayanan kami dari bagian program dan data berupaya untuk mengisi data pemilih sesuai dengan keinginan pemilih. Namun masih ada perbaikan data pemilih yang invalid yaitu data tidak sesuai dengan pemilih itu sendiri misalnya kesalahan nama, tanggal lahir dan sebagainya. Kami berupaya memperbaiki secepatnya.*".

Selanjutnya menurut Ibu Rini Ambarwati selaku Kasubag Hukum, menyatakan :

> *"Untuk mendapatkan responsivitas dari stake holders dan masyarakat kami turun langsung kelapangan untuk menanyakan kebenaran data yang kami peroleh atau verifikasi faktual, apakah data tersebut sudah data yang sebenarnya misalnya pada anggota partai politik kami menyessuaikan ijazah yang bersangkutan dan juga memastikan dokumen – dokumen yang telah diserahkan dan juga melakukan sosialisasi kepada stake holders dan masyarakat apabila ada Undang – Undang terbaru seperti Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan juga peraturan – peraturan terbaru seperti peraturan KPU terbaru dan sebagainya"*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bapak Romi Erdianto, selaku Staf bagian hukum, menyatakan :

> *"Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga menginput masukan dan saran dari masyarakat melalui proses sosialisasi tersebut atau apabila ada sengketa, dalam menyelesaikan sengketa tersebut kami berupaya menerima masukan dari kedua belah pihak yang bersengketa tersebut baru kami melakukan mediasi untuk penyelesaian kasus seperti Pemilu tahun 2019 kebetulan kami ada pengaduan PKPI salah satu dapilnya ditiadakan karena tidak memenuhi syarat di perwakilan perempuannya. Sempat ada mediasi tapi tidak ada titik temu dan pada dasarnya semua gugatan dikabulkan oleh bawaslu. Bantuan hukum tidak ada, tapi kami ada kerjasama dengan kejaksaan negeri renagat kejaksaan negeri sebagai kuasa hukumnya."*

Sebagian besar Aparatur Sipil Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam melaksanakan pemilihan umum, hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KPU Kabuptaen Indragiri Hulu untuk membangkitkan partisipasi masyarakat untuk turut andil dalam proses pemilu.

Selanjutnya mengenai tanggapan Bawaslu terhadap kinerja ASN Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Dedi Risanto selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2018 mengenai Responsivitas ASN di KPU Kabupaten Indragiri Hulu, menyatakan :

> *"Secara keseluruhan kinerja KPU sudah cukup memuaskan namun masih ada terdapat beberapa kelemahan dalam melaksanakan menginput masukan dari masyarakat dan kinerja KPU masih belum sistematis dan masih terdapat tumpang tindih pekerjaan."*

Selanjutnya bapak Mulianto, menyatakan :

> *"Di KPU sendiri tahapan begitu banyak ditambah dengan kinerja penunjang. Indikator yang digunakan adalah penyelesaian tahapan – tahapan pemilu dapat diselesaikan dengan baik dan penyelenggara pemilu sukses untuk Kabupaten Indragiri Hulu. Pelayanan nya pun berkualitas hal ini*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilihat dari seluruh rangkaian tahapan dapat diselesaikan dengan baik. Disini kita lihat kenerja kpu sudah sangat maksimal. Namun dari segi partisipasi masyarakat masih kurang, dalam memberikan sosilaisasi kepada masyarakat mengenai pemilihan umum harus di tingkat lagi.”

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Khairudin pada tanggal 10 Oktober 2018 mengenai Responsivitas dalam Kineja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan :

“*Dalam menyusun agenda kegiatan kita melibatkan partisipasi masyarakat contoh dalam melaksanakan pemilihan gubernur Riau kita mengadakan pawai taaruf dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk mengenalkan partai - partai yang mengikuti pemilu gubernur tahun 2018. Kami sudah berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan berusaha menerapkan pelayanan prima kepada peserta pemilu sebagai objek pelayanan di Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu.*”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sudah dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan tugas sudah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat dalam proses pemilihan umum. Dan juga memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pemilihan umum, karena melalui pemilihan umum dapat menentukan pemimpin kita kedepannya sehingga sangat berpengaruh bagi bangsa dan Negara.

Namun upaya yang dilakukan KPU masih belum optimal seperti dijelaskan oleh Bawaslu, adapun ketidakoptimalan tersebut disebabkan system aplikasi data pemilih (SIDALIH) yang dimikili oleh KPU, servernya selalu bermasalah sehingga pada saat melakukan proses pemuktahiran karena KPU mengolah banyak data dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

system tersebut, sehingga menyebabkan pelaksanaannya menjadi terhambat. Proses itu sendiri dijelaskan dalam gambar dibawah ini :

Gambar V.1 : Alur Bagan Sistem Aplikasi Data Pemilih

Sumber : KPU Kabupaten Indragiri Hulu, 2018

Berdasarkan tahapan tersebut masih banyak terdapat permasalahan dalam proses tersebut, hal ini disebabkan karena yang mengakses aplikasi sidalih tersebut diakses oleh KPU di seluruh Indonesia, sehingga hal ini yang menjadi penghambat dalam proses pendataan peserta pemilih. Bahkan untuk mengakses sidalih dibagi dalam kelompok – kelompok dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diharapkan KPU RI untuk menambahkan kapasitas agar servernya mudah diakses sehingga proses pendataan peserta pemilih menjadi lancer dan mudah.

4. Responsibilitas.

Responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsifitas.

Responsibilitas merupakan pemaknaan umum tentang tanggung jawab. Ia bisa berarti tanggung jawab secara moral dan bukan moral. Pemaknaan yang lebih khusus adalah liabilitas. Istilah "*liabilitas"* sering kali dialih bahasakan menjadi "tanggung gugat" yaitu tanggung jawab secara hukum.

Faktor pendukung Kinerja ASN pada kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada indikator Responsibilitas adalah KPU Kabupaten Indragiri Hulu sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan melakukan tugas – tugas birokras sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi Publik. Sedangkan faktor penghambat pada indikator Responsivitas, masih rendahnya tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Responsibilitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah bentuk Responsibilitas yang diberikan Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan Aparatur Sipil Negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak Dedi Pedianto selaku Kasubag Teknis dan Hupmas pada tanggal 15 oktober 2018, yang menyatakan bahwa :

> "*Dalam melaksanakan tugas sebagai Bagian teknis dan hupmas tugas utama kami adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu kami juga melakukan bimbingan teknis dan kampanye dalam mengenalkan calon kepada masyarakat, salah satu contoh bimbingan teknis yang kami lakukan adalah perhitungan surat suara dan rekapitulasi surat suara. Didalam bimbingan teknis* "

Selanjutnya Bapak Dedi, selaku staf bagian teknis dan hupmas menyatakan :

> *"Dalam memberikan resposibilitas kepada masyarakat upaya yang kami lakukan berupa bimbingan teknis, sosialisasi dan kampanye agar masyarakat mengenal dengan baik calon – calon yang akan di pilih pada pemilihan umum. Kami juga berusaha menerima masukan dan saran dari peserta pemilu demi perbaikan kinerja yang akan datang. Sampai saat ini baik peserta pemilu dan partai politik merasa puas dengan pelayanan di bidang teknis".*

Hasil tanggapan Ibu Nurhasyidah selaku Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik menyatakan bahwa :

> *"Kami tidak melibatkan masyarakat dan peserta pemilu dalam menyusun anggaran sedangkan mengenai penggunaan anggaran kami selalu terbuka melaui web dan SIPP Kabupaten Indragiri Hulu mengenai jumlah anggaran yang diterima dan anggaran yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum berkaitan dengan padatnya agenda dan kegiatan yang dilakukan".*

Sedangkan menurut Yusti Eilendra selaku staf bagian umum, keuangan dan logistic menyatakan bahwa :

> *"Dalam meminta keuangan ke KPPN saya rasa sudah sesuai dengan kebutuhan penyelenggara. Dalam meminta dana ke KPPN kita harus*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

membuat laporan penggunaan dana biar dananya cair. Saya rasa sampai hari ini belum pernah mendapat teguran mengenai laporan keuangan. Semua laporan keuangan pasti terbuka kepada atasan dan juga kepada PPK pada saat pencairan dana semua di kasih kepada PPK. Kerjasana dengan bagian umum dalam menyusun anggaran, pasti ada hubungan karna harus minta tanda tangan dari kasubag umum dan PPK yang pertama mengetahui perencanaan keuangan."

Selanjutnya menurut Renny Septiana yang juga selaku staf bagian umum, kuangan dan logistic menyatakan bahwa :

"Bentuk pertanggung jawaban kami sebagai bagian keuangan yaitu menyelesaikan laporan – laporan yang akan dilaporkan kepada atasan yaitu LPJ Bendahara, sebelum tanggal 10 setiap bulannya harus sudah diantar rekening Koran, realisasi anggaran, buku kas umum, SIMAK, setiap bulan harus dilaporkan kepada atasan."

Kemudian menurut Staf Bagian Program dan Data yaitu bapak Dedi Afda Putra yang menyatakan :

"Dalam menyusun data awal diperoleh dari hasil DP4 (daftar penduduk, potensial, pemilih) disinkronisasi dengan daftar pemilih tetap terakhir disinkronisasi baru di tetapkan oleh KPU Provinsi dan Kota. Waktu yang diperlukan operator untuk pilkada butuh waktu 3 bulan. Sementara pemilu sementara 3 bulan dan di tambah lagi 2 bulan. Sekarang sudah memasuki bulan ke 4. Kalau diaplikasi KPU sesuai tahapan cuma penambahan sekarang adalah tahapan penyempurnaan."

Sedangkan menurut Staf Bagian Program dan Data yaitu bapak Guswaldi menyatakan :

"*Dalam menjalankan tugas kami dari bagian program dan data berupaya untuk mengisi data pemilih sesuai dengan keinginan pemilih. Namun masih ada perbaikan data pemilih yang invalid yaitu data tidak sesuai dengan pemilih itu sendiri misalnya kesalahan nama, tanggal lahir dan sebagainya. Kami berupaya memperbaiki secepatnya.*".

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya menurut Ibu Rini Ambarwati selaku Kasubag Hukum, menyatakan :

> *"Hukum tugas utama yaitu memback up sebagian lain. Artinya ada masalah dan sengketa di bagian KPU kami menyusun jawaban dan peraturannya. Garis besarnya yaitu kami membuat aturan dan keputusan KPU Indragiri Hulu dan menyusun bahan – bahan sengketa hukum. Waktu yang diperlukan tergantung pada tahapannya. Seandainya ada gugatan waktu antara 1 hari atau 2 hari biasanya diataur jadwal oleh bawaslu dan KPU itu sendiri. Jika ada gugatan bawaslu kurang lebih 4 hari untuk jawaban jika ada gugatan di MK gugatan PHPU itu kami diberi waktu 2 hari sampai pada jawaban setelah menerima gugatan dari pemohon. Kami melakukan sosialisasi seperti sosialisasi berupa aturan baik UUD maupun peraturan KPU terbaru seperti UUD Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyampaikan informasi kepada stake holder terkait dengan informasi – informasi terbaru terkait dengan pemilihan umum seperti Parpol, Ormas dan Masyarakat. Seperti peraturan KPU terbaru kami melakukan sosialisasi peraturan KPU tentang pencalonan dan itu sangat diperlukan parpol dalam bentuk tatap muka kami mengundang stakeholder."*

Bapak Romi Erdianto, selaku Staf bagian hukum, menyatakan :

> *"Kami sudah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, karena bagian hukum yang memback up semua bagian yang memiliki permasalahan. Jadi kami harus menyiapkan aturan – aturan sesuai dengan Undang – Undang dan KPU RI melakukan verifikasi faktual kepada partai politik itu turun kelapangan langsung untuk menanyakan langsung ke pada anggota parpol bahwa yang bersangkutan betul atau tidak menjadi anggota parpol. Itu syarat anggota politik untuk menjadi anggota pemilu. Selanjutnya verifikasi faktual calon perseorangan yaitu anggota DPD itu syarat terhadap dukungan minimal dukungan di Riau itu 2000. Kami menanyakan langsung kepada pendukung anggota DPD tersebut apakah benar dia mendukung penuh anggota DPD tersebut kalo tidak kami coret. Pelaporan dan tanggung jawab. Selanjutnya calon anggota DPRD jika kita merasa keganjilan dalam administrasinya contohnya ijazah betul atau tidak yang bersangkutan lulusan kampus tersebut. Ataupun nama di KTP tidak sesuai itu langsung ke instansi yang terkait"*

Secara keseluruhan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

baik, hal ini dilihat dari hasil wawancara ASN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu berkomitmen dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, hal ini dibuktikan dengan memberikan laporan – laporan kepada pimpinan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Selanjutnya mengenai tanggapan Bawaslu terhadap kinerja ASN Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Dedi Risanto selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2018 mengenai responsibilitas kinerja ASN di KPU Kabupaten Indragiri Hulu, menyatakan :

> *"Sudah cukup baik, apa yang kami minta dapat tersedia dengan baik. Mengenai produktivitas kerja sangat baik. Kinerja ASN menurut saya sudah mengalami peningkatan misalnya semua laporan yang kami minta sudah selesai di kerjakan tepat waktu dengan baik. Seperti data yang kami perlukan mendesak bisa selesai dalam satu hari"*

Kemudian wawancara dengan bapak Mulianto, menyatakan :

> *"Selama bermitra khusus dari tahun 2017 ada peningkatan kinerja. Di KPU sendiri tahapan begitu banyak ditambah dengan kinerja penunjang. Indikator yang digunakan adalah penyelesaian tahapan – tahapan pemilu dapat diselesaikan dengan baik dan penyelenggara pemilu sukses untuk Kabupaten Indragiri Hulu."*

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Khairudin pada tanggal 10 Oktober 2018 mengenai responsibilitas dalam Kineja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan :

> *"Dalam pelaksanaan kegiatan pada kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu sudah sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi pelayanan KPU yang di tetapkan oleh KPU RI. "*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam kaitannya dengan Responsibilitas KPU Kabupaten Indragiri Hulu, jelas bahwa pihak KPU selalu sigap dalam menyikapi apabila ada isu – isu terkait kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Apapun tindakan yang mungkin dapat merugikan pihak lain akan dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Responsibilitas ditujukan pada indikator penentu atas lahirnya suatu tanggung jawab, yaitu suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati. Jadi, prinsip tanggung jawab dalam arti responsibilitas lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko yang didasarkan atas moral tersebut.

5. Akuntabilitas.

Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dianggap benar dan sesuai dengan niali-nilai norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinscipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Norma dan etika pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut di antaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, dan orentasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat.

Faktor pendukung Kinerja ASN pada kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada indikator Akuntabilitas adalah KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengetahui dengan pasti tugas dan fungsi dari masing – masing sub bagian. Sedangkan faktor penghambat pada indikator Akuntabilitas adalah ketidak disiplinan dan rendahnya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Untuk lebih jelas lagi mengenai Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

Bagaimanakah Akuntabilitas kinerja yang diberikan Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu?

Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan Aparatur Sipil Negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak Dedi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pedianto selaku Kasubag Teknis dan Hupmas pada tanggal 15 Oktober 2018, yang menyatakan bahwa :

> *"Mengenai akuntabilitas kinerja kami berusaha melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Salah satunya mengadakan pertemuan teknis berupa sosialisasi, kampanye dan lain – lain. Selama pemilu kurang lebih 8 bulan. Apakah juknis selesai dengan waktu yang telah di tetapkan. Sampai saat ini peserta pemilu dan parpol merasa puas dengan kinerja teknis."*

Selanjutnya Bapak Dedi, selaku staf bagian teknis dan hupmas menyatakan :

> *"Bimtek apa saja yang sudah dilakukan. Yaitu perhitungan surat suara terus rekapitulasi surat suara. Di dalam bimtek kita sebagai pelaksana selalu memberikan aspirasi dari masyarakat dan juga menerima masukan dari masyarakat. Waktu yang dibutuhkan untuk menerima berkas verifikasi calon peserta pemilu itu selama 1 minggu. Proses publikasi dan sosialisasi sejauh ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah di tetapkan. "*

Hasil tanggapan Ibu Nurhasyidah selaku Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik menyatakan bahwa :

> *"Dalam menyusun perencanaan keuangan kami tidak melibatkan masyarakat, kami hanya melibatkan berapa jumlah Ad hoc yang ada di KPU inhu. Sejauh ini tidak ada kendala dalam perencaan kendala." Selama ini keuangan kita selain di kelola oleh pengelolla keuangan setiap bulannya di review oleh bagian keuangan dan umum dan logistic dalam rapat pleno."*

Sedangkan menurut Yusti Eilendra selaku staf bagian umum, keuangan dan logistic menyatakan bahwa :

> *"Laporan – laporan yang dilaporkan ke atasan yaitu LPJ bendahara, sebelum tanggal 10 harus sudah diantar rekening Koran, realisasi anggaran, buku kas umum, simak, setiap bulan harus dilaporkan kepada atasan. Saran peningkatan kinerja sebenarnya kami masih perlu ada bimbingan dari orang yang memahai betul masalah keuangan ini, misal dari BPKP dalam membuat SPJ lebih bagus lagi."*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya menurut Renny Septiana yang juga selaku staf bagian umum, kuangan dan logistic menyatakan bahwa :

> *"Mengenai akuntabilitas kinerja kami sudah berusaha menyelesaikan memberikan pelayanan yang baik seperti laporan – laporan yang dilaporkan kepada atasan yaitu LPJ Bendahara, sebelum tanggal 10 setiap bulannya harus sudah diantar rekening Koran, realisasi anggaran, buku kas umum, SIMAK, setiap bulan harus dilaporkan kepada atasan."*

Kemudian menurut Staf Bagian Program dan Data yaitu bapak Dedi Afda Putra yang menyatakan :

> *"Saya sebagai operator aplikasi data pemilih, adalah aplikasi sebagai pemuktahiran pemilih pemilu maupun pilkada disini segala pebaikan dipalikasi mepallui daya pemilih melalui aplikasi data pemilih. Data awal diperoleh dari hasil DP4 (daftar penduduk, potensial, pemilih) disinkronisasi dengan daftar pemilih tetap terakhir disinkronisasi baru di tetapkan oleh KPU Provinsi dan Kota. Waktu yang diperlukan operator untuk pilkada butuh waktu 3 bulan. Sementara pemilu sementara 3 bulan dan di tambah lagi 2 bulan. Sekarang sudah memasuki bulan ke 4. Kalau diaplikasi KPU sesuai tahapan cuma penambahan sekarang adalah tahapan penyempurnaan."*

Sedangkan menurut Staf Bagian Program dan Data yaitu bapak Guswaldi menyatakan :

> "*Dalam melaksanakan tugas kami sudah berusaha memaksimalkan kinerja dengan baik, namun masih terdapat permasalahan dalam menjalankan tugas yaitu menginput Sidali, smart dan e-monev. Seperti e-monev dilakukan setiap bulan sering kali terjadi kendala dalam penginputan e-monev yang disebabkan jaringan yang tidak bagus sehingga saya sering mendapat teguran dari KPU Pusat*".

Selanjutnya menurut Ibu Rini Ambarwati selaku Kasubag Hukum, menyatakan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"PKPU mengawasi pekerjaan teknis tersebut. Pernah ada beberapa kali sengketa pada pemilu tahun 2014 itu kami sebagai pihak terkait karna pemilu tahun 2014 termohon itu KPU RI jadi kami kebetulan di Indragiri Hulu itu ada beberapa Kecamatan pyang bermasalahn tp tidak ada yng signifikan. Pemilu tahun 2019 kebetulan kami ada pengaduan PKPI salah satu dapilnya ditiadakan karena tidak memenuhi syarat di perwakilan perempuannya. Sempat ada mediasi tapi tidak ada titik temu dan pada dasarnya semua gugatan dikabulkan oleh bawaslu. Bantuan hukum tidak ada, tapi kami ada kerjasama dengan kejaksaan negeri renagat kejaksaan negeri sebagai kuasa hukumnya.

Bapak Romi Erdianto, selaku Staf bagian hukum, menyatakan :

"Setiap kegiatan pasti akan kami laporkan cuma tidak dalam bentuk laporan tertulis cuma selalu kami buatkan kronologisnya apabila sengketan kami ingat kronologisnya dari awal sampai akhir. Saran dan masukan terhadap kinerja SDM bagian hukum tidak sesuai dengan bidang ilmu".

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinscipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Norma dan etika pelayanan yang berkembang dalam masyarakat tersebut di antaranya meliputi transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakkan hukum, hak asasi manusia, dan orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat.

Dari hasil yang didapatkan, secara keseluruhan mengenai kinerjanya dan data – data yang terkait kinerja KPU Kabupaten Indragiri Hulu, pada umumnya ASN Kabupaten Indragiri Hulu sudah berupaya secara maksimal, namun hal ini tidak menjamin tercapainya hasil maksimal seperti yang diharapkan oleh KPU Kabupaten

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indragiri Hulu karena pada kenyataannya masih banyak yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum di Kabupaten Indragiri Hulu.

Selanjutnya mengenai tanggapan Bawaslu terhadap kinerja ASN Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Dedi Risanto selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yang dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2018 mengenai Akuntabilitas kinerja ASN di KPU Kabupaten Indragiri Hulu, menyatakan :

> *"Secara aturan ASN harus bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kalau kita lihat sudah sangat professional karna sudah menjalankan tugas sesuai dengan Tupoksi yang ada pada KPU itu sendiri. Misalnya dalam mempersiapkan logistic tepat pada waktunya walaupun ada keterlambatan hal – hal tertentu, namun bisa di tangani dengan baik. Saran tidak banyak sudah cukup bagus, Cuma ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Perlu sosialisasi ke masyarakat. Karna tingkat penggunaan suara dari masyarakat dalam pemilu masih rendah."*

Selanjutnya bapak Mulianto, menyatakan :

> *"Dari pemantauan saya, akuntabilitas kinerja yang dilakukan cukup memuaskan Di KPU sendiri tahapan begitu banyak ditambah dengan kinerja penunjang. Indikator yang digunakan adalah penyelesaian tahapan – tahapan pemilu dapat diselesaikan dengan baik dan penyelenggara pemilu sukses untuk Kabupaten Indragiri Hulu."*

Sementara itu berdasarkan tanggapan Kepala Sekretariat KPU Kabupaten Indragiri Hulu Bapak Khairudin pada tanggal 10 Oktober 2018 mengenai akuntabilitas dalam Kineja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan :

> *"KPU Kabupaten Indragiri Hulu berpedoman pada aturan – aturan yang telah di tetapkan baik dari KPU Pusat maupun KPU Provinsi, seperti dalam melalukan Audit BPKP serta dalam memberikan saran dan masukan kepada ASN di KPU Kabupaten Indragiri Hulu Saya sebagai Kepala Sekretariat hanya menyarankan kepada kasubag - kasubag dan jajaran saya*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk mengerjakan tugas dan fungsi masing - masing dan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah di sediakan."

Pada indikator Akuntabilitas secara keseluruhan kinerja ASN pada Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa ASN melaporkan laporan – laporan kegiatan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, namun masih ada ASN yang tidak mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan sudah dua kali mendapat surat peringatan dari KPU Pusat.

Secara keseluruhan diketahui kineja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu berada pada Kategori Cukup Baik. Hal ini terlihat dari masih rendahnya produktivitas kinerja dan akuntabilitas kinerja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya masih adanya ASN yang tidak mengetahui pasti mengenai jam masuk dan pulang kantor, masih ada yang mengatakan jam masuk pukul 08.00 sedangkan jam masuk kantor sesuai dengan yang telah di tetapkan adalah pukul 07.30 WIB. Sehingga mengenai jam masuk dan pulang kantor masih perlu ditetapkan dan disosialisasikan kepada ASN agar dapat meningkatkan kedisiplinan ASN pada Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dilapangan, maka diperoleh kesimpulan mengenai Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu masih belum optimal. Kinerja yang belum optimal dilihat dari masih adanya ASN yang tidak mengetahui jam masuk dan pulang kantor,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masih banyak nya ASN yang datang ke kantor tidak sesuai dengan waktu yang telah dtetapkan serta pulang lebih awal dari yang telah di tetapkan, ketidakdisiplinan ASN KPU Kabupaten Indragiri Hulu berdampak pada keterlambatan kinerja ASN pada Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Banyaknya laporan – laporan yang tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan bahkan sampai mendapat teguran dari KPU Pusat.

Rendahnya tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas, hal ini terlihat dari Keterlambatan pelaporan hasil kinerja berupa e-monev, baik itu yang dilaporkan setiap bulan, enam bulan sekali maupun dalam jangka waktu 1 tahun. Serta masih banyaknya tumpang tindih pekerjaan, dimana ASN teersebut menyerahkan tugas yang seharusnya dikerjakannya kepada bawahan, sehingga bawahan tidak bisa mengerjakan pekerjaannya dan harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan tersebut. Serta masih banyak ASN bekerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bahkan tidak mengetahui dan memahami tupoksinya sebagai ASN pada Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

Adapun instrument dari observasi penelitian ini meliputi proser kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum pada masing – masing bagian. Diantaranya pada bagian umum yang bertugas mencatat surat masuk dan surat keluar, jika ada surat masuk diterima oleh bagian umum dalam hal ini ibu Habsah atau Bapak Armen, disposisikan pada sekretaris hal ini membutuhkan waktu sampai 2 hari kerja. Sedangkan pada bagian Program dan Data yang bertugas mengoperasikan aplikasi sidalih membutuhkan waktu sampai dengan 1 minggu, hal ini disebabkan gangguan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari servernya karena yang mengakses aplikasi tersebut seluruh Indonesia. Sedangkan pada bagian hukum Hukum tugas utama yaitu memback up sebagian lain. Artinya ada masalah dan sengketa di bagian KPU kami menyusun jawaban dan peraturannya. Garis besarnya yaitu kami membuat aturan dan keputusan KPU Indragiri Hulu dan menyusun bahan – bahan sengketa hukum.

5.3. Faktor – Faktor yang Menghambat Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Beberapa hambatan yang dihadapi Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan kinerja baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal) adalah sebagai berikut :

1. Hambatan dari dalam (internal) meliputi :
   a. Kurang disiplinnya Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas, seperti tidak sesuainya jam masuk dan pulang kantor dengan yang telah ditetapkan.
   b. Minimnya fasilitas kantor baik berupa Perangkat Komputer yang tidak memadai dan juga jaringan WIFI yang kurang memadai sehingga menghambat kinerja ASN pada Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
   c. Masih terbatasnya kemampuan SDM dalam menjalankan tugas. Hal ini masih banyak ASN yang bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Sehingga ASN tersebut kesulitas memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Hambatan dari Luar (eksternal) meliputi :

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilu, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak menyumbangkan suaranya sewaktu pemilu diadakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :